

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BUNTOK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini merupakan laporan kinerja Tahunan yang berisi Pertanggung-jawaban Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi pada Tahun 2023. LAKIP ini memberikan gambaran tentang (1) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi; (2) Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU); (3) Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja; (4) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Tahun berjalan dengan target kinerja 5 Tahunan yang direncanakan. Sedangkan orientasi akuntabilitas kinerja ini adalah mengukur seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat di capai pada akhir periode Perencanaan.

Pencapaian tujuan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2023 menggunakan 3 (enam) Sasaran Strategis dan 6 (Enam) Indikator Kinerja dan target yang dapat diukur, telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), selanjutnya ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023. Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan menggunakan Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) dan perbandingan dengan Realisasi Capaian Tahun sebelumnya.

Hasil Pengukuran Penetapan Kinerja (PPK) Tahun 2023 menunjukkan bahwa Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan berhasil baik dengan nilai 100%. Demikian juga hasil perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntok, Februari 2024

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



SELVIRIYATMZ, SP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700714 199803 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
FORMAT LAKIP	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Perkembangan Kondisi Organisasi	3
D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	6
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Perencanaan	8
B. Tujuan dan Sasaran	10
C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	11
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA DSPMD KAB. BARSEL	28
A. Pengukuran Capaian Kinerja	28
B. Analisis Capaian Kinerja	31
C. Evaluasi Capaian Kinerja	32
BAB. IV. PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran Tindak Lanjut	34
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).	
Lampiran 3. Penetapan Kinerja (PK).	
Lampiran 4. Pengukuran Penetapan Kinerja (PPK).	
Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama (IKU).	
Lampiran 6. Rencana Aksi	
Lampiran 7. Pohon Kinerja	
Lampiran 8. Cascading	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 - 2026 adalah : (1) Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat (2) Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif.

Dari tujuan tersebut diatas, akan dijabarkan kembali dalam 3 (tiga) sasaran strategis pembangunan dengan 6 (enam) indikator sasaran kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dari hasil analisis Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) ternyata secara umumnya menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja telah berhasil dengan sangat baik yaitu dengan total nilai 100%. Hal ini berarti bahwa target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai bahkan ada sebagian dari indikator melebihi dari target sasaran yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan untuk memenuhi permintaan/kebutuhan dari masyarakat untuk penyerataan pembangunan.

Kemudian apabila kita bandingkan realisasi sasaran kinerja 2023 dengan realisasi sasaran kinerja 2022, secara umum dilihat bahwa kuantitas (jumlah pekerjaan) terjadi peningkatan berarti terjadi peningkatan pelayanan.

Pengukuran Penetapan Kinerja (PPK) 2023 telah disesuaikan dengan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023 s/d 2026 yang sudah disesuaikan lagi dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga Penetapan Kinerja (PK) 2026 juga mengalami perubahan pula. Dikarena Renstra 2023 - 2026 sudah direvisi untuk menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

Format LAKIP

- Ikhtisar Eksekutif
- Pendahuluan
- Rencana Kinerja
- Akuntabilitas Kinerja
- Penutup
- Lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada Tahun mendatang.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga DSPMD dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Barito Selatan dalam melayani/ memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LAKIP Tahun 2023 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis DSPMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DSPMD Kabupaten Barito Selatan, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, DSPMD menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun DSPMD kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran DSPMD Kabupaten Barito Selatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Salah satu wujud dari pertanggung jawaban dalam upaya terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah adalah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir Tahun berjalan.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), setiap Pejabat Eselon II keatas (yang mandiri) diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan melaporkan hasilnya dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dalam pelaksanaan kerjanya Instansi Pemerintah berdiri dalam asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, mengacu pada kepentingan umum, keterbukaan, profesionalisme dan terpercaya (akuntable).

Sehingga tujuan akhir selain sebagai bahan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan juga yang terpenting dari semuanya adalah dalam rangka mengukur setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara juga harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun ini merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintahan negara oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan sebagai wujud dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan strategis.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan seperti dibawah ini.

Tugas Pokok :

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan.
- 2) Sekretariat, membawahi dan mengoordinasikan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
- 4) Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 5) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa :
- 6) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan :
- 7) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Hasil Penyetaraan

C. Perkembangan Kondisi Organisasi

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi berdasarkan Struktur Organisasi yang ada pada Tahun 2023 ini di dukung oleh Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan sebanyak 93 Orang, yang terdiri dari 39 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 54 Orang Tenaga Kontrak (Tekon)

Dari sejumlah tenaga tersebut, dapat diklasifikasikan berdasarkan Ruang Golongan dan Pendidikan sebagai berikut :

- a. Ruang Golongan Pegawai :
 - Golongan IV : 5 Orang
 - Golongan III : 31 Orang
 - Golongan II : 3 Orang
 - Golongan I : 0 Orang
- b. Tingkat Pendidikan :
 - Pasca Sarjana (S2) : 9 Orang
 - Sarjana (S1) / D4 : 19 Orang
 - Sarjana Muda / D3 : 4 Orang
 - SLTA : 7 Orang
 - SLTP / SD : 0 Orang

c. Diklat Penjenjangan :

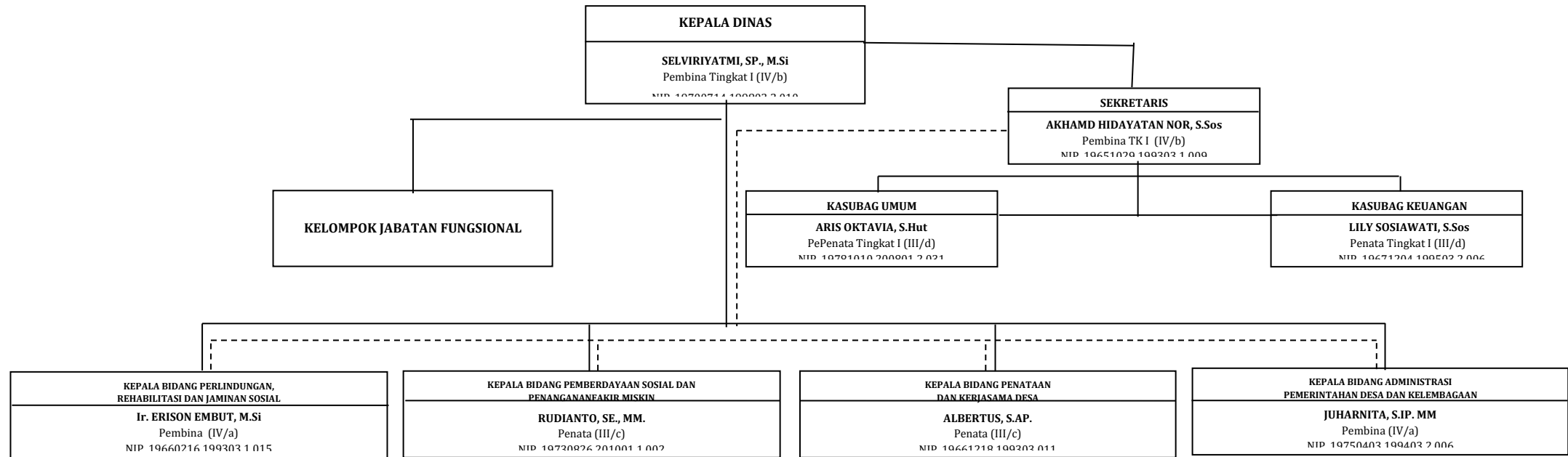
Sedangkan ditinjau dari segi Diklat Penjenjangan Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan berjumlah 12 orang sebagai berikut :

- Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 1 orang
- Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 2 orang
- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 9 orang

Dengan bermodalkan personil yang ada, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan mengacu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..

Pada Tahun Anggaran 2023, pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan belum berjalan maksimal, hal ini dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**



D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1. Faktor Lingkungan Internal;

Faktor internal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja baik kekuatan maupun kelemahan yaitu :

a. Kekuatan (Strengths) :

- 1). Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 2). Adanya acuan program pembangunan yang jelas (RPJPD, RPJMD dan RKP Daerah);
- 3). Sumber Daya Manusia (jumlah dan tingkat pendidikan) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum memadai dilihat dari segi jenjang pendidikan;
- 4). Jumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- 5). Koordinasi internal dan eksternal yang baik;
- 6). Pelayanan Informasi teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah memadai.

b. Kelemahan (Weaknesses) :

- 1). Kondisi sosial budaya yang masih tradisional;
- 2). Wilayah binaan yang tersebar (Geografi);
- 3). Sistem Informasi Managemen dari pusat ke propinsi ke kabupaten sampai ke kecamatan kurang memadai;
- 4). Tingkat akurasi data-data perlu ditingkatkan;
- 5). Kondisi sarana dan prasarana (mobilitas) yang mendukung operasional di tingkat lapangan milik dinas tidak memadai;
- 6). Terbatasnya Kualitas dan kuantitas petugas untuk menunjang tugas fungsi DSPMD;
- 7). Terbatasnya dana yang tersedia untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.

2. Faktor Lingkungan Eksternal;

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja baik secara peluang lingkungan maupun ancaman yaitu :

a. Peluang (Opportunities);

- 1). Sumber daya alam cukup memadai untuk menunjang APBDes.
- 2). Adanya kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat desa, melalui pemberian kewenangan untuk pengelolaan keuangan desa;
- 3). Minat masyarakat untuk mengembangkan pembangunan di desanya cukup tinggi;
- 4). Tuntutan masyarakat untuk pengembangan/peningkatan kualitas desanya cukup tinggi;
- 5). Tersedianya teknologi untuk mengakses berbagai informasi pembangunan melalui ilmu serapan.

b. Ancaman (Threats);

- 1). Tingkat pendidikan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa masih rendah;
- 2). Sarana dan prasarana untuk menunjang pemerintahan desa masih kurang;
- 3). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih lemah/kurang;
- 4). Infrastruktur (jalan, jembatan) yang menghubungkan antar desa, desa dengan kecamatan/kabupaten perlu ditingkatkan;
- 5). Pengelolaan kelembagaan desa masih lemah (BUMDes, Profil desa, dll).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis.

Perencanaan Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini, peluang, tantangan dan kendala yang bersifat strategis dan vital, landasan yang menyangkut kewenangan dan tugas pokok, maka ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Barito Selatan yang merupakan cita-cita dan harapan sebagai arah Pembangunan Sosial.

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta dengan mempertimbangkan isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan misi yang ada, memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan misi :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Aparatur Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang Pembinaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta penunjang pelayanan Pemerintahan Desa;

3. Meningkatkan Motivasi Kelembagaan Masyarakat yang profesional dan kondusif di lingkungan kerja;
4. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan secara efektif dan efisien;
5. Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
6. Pemantapan nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Pengembangan dan Pemantapan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
8. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;
9. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna sesuai Kebutuhan Masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi, Arah dan **Tujuan** yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 yaitu ;

1. Meningkatkan Keberdayaan, Partisipasi dan kelembagaan Masyarakat Pedesaan;
2. Meningkatkan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan;
3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Sarana Prasarana Pemerintahan desa;
4. Meningkatkan pendayagunaan TTG dalam pengelolaan potensi SDA.

Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka **Sasaran** Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan yang ingin dicapai pada Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keberdayaan, Partisipasi dan kelembagaan Masyarakat Pedesaan;
2. Meningkatnya Kelembagaan Ekonomi Pedesaan;
3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Sarana Prasarana Pemerintahan desa;
4. Meningkatnya pendayagunaan TTG dalam pengelolaan potensi SDA.

C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Kebijakan Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, yang telah ditetapkan. Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam Renstra maka untuk mengukur tingkat keberhasilannya dalam 1 (satu) Tahun dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja Utama dan target yang dapat diukur.

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaa Masyarakat Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> >Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat >Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat >Beningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum >Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat > Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa > Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna > Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat > Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 	<p style="text-align: center;">50 Dokumen 80% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">80% Lembaga</p> <p style="text-align: center;">40% Unit</p> <p style="text-align: center;">80% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">100% Laporan 100% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">30% Desa</p>
2	Meningkatnya Prosentase Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> >Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa >Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa > Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa > Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa >Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas > Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa >Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas >Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa >Jumlah Dokumen Profil Desa >Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan >Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota >Jumlah Penerimaan Iuaran pembayaran BPJS untuk Aparatus Perangkat Desa 	<p style="text-align: center;">80% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">80% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">80% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">100% Orsng</p> <p style="text-align: center;">270 Orang</p> <p style="text-align: center;">80% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">75% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">90% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">100% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">75% Dokumen</p> <p style="text-align: center;">100% Orsng</p>

3	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Orang Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didata ➢ Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/ Kota. 	<p>75% Dokumen</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Keluarga</p> <p>100% Keluarga</p> <p>100% Sertifikat</p> <p>100% Keluarga</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p>
4	Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota ➢ Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota 	<p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Makam</p>

Buntok, Februari 2024



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2023**

SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa

- Fungsi :**
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
 2. Penyiapan pelaksanaan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan fakir miskin
 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan fakir miskin
 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan fakir
 5. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
 6. Pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan penataan dan kerjasama Desa, Bina Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan Kemasyarakatan Adat dan Masyarakat Hukum Adat Sosial Budaya dan Pelatihan Masyarakat, Penataan BUMDes dan Usaha Ekonomi Masyarakat
 7. Pengkoordinasian Kebijakan Pembangunan Masuk Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 8. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan di bidang Perlindungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin bidang Penataan dan Kerjasama Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan
 9. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan

No	TUJUAN	SASARAN	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3				6
1	SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
a	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	1. Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan 2. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Angka Kemiskinan Daerah ➢ Angka Kemiskinan Ekstrim ➢ Indeks Desa Membangun ➢ Prosentase PMKS yang mandiri 	<p>Jumlah Masyarakat Miskin dibagi Jumlah penduduk</p> <p>Jumlah kemiskinan Ekstrim dibagi Jumlah penduduk</p> <p>Jumlah Desa Berkembang dibagi dengan Jumlah Desa</p> <p>Jumlah PMKS Mandiri dibagi Jumlah PMKS</p>	<p>Bid. Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin, Bid. Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, Bid. Adminitrasi Desa DSPMD</p> <p>Bid. Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin, Bid. Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, Bid. Adminitrasi Desa DSPMD</p> <p>Bid. Pemdes dan Bid. Penataan desa DSPMD</p> <p>Bid. Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial DSPMD</p>	<p>DinsosPMD</p> <p>DinsosPMD</p> <p>DinsosPMD</p> <p>DinsosPMD</p>
b	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	3. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Nilai SAKIP DINSOSPMD ➢ Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada DSPMD 	<p>Nilai Hasil Evaluasi</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>DSPMD</p> <p>DSPMD</p>	<p>DinsosPMD</p> <p>DinsosPMD</p>

Buntok, Februari 2024



Strategi dan kebijakan Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini sebagai dasar Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023.

PENETAPAN KINERJA (PK)

SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
TAHUN ANGGARAN : Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5		6
1	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat ➢ Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Beningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ➢ Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ➢ Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ➢ Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 	<p>50 Dokumen</p> <p>80% Dokumen</p> <p>80% Lembaga</p> <p>40% Unit</p> <p>80% Dokumen</p> <p>100% Laporan</p> <p>100% Dokumen</p> <p>30% Desa</p>	<p>1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p>a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. PROGRAM PENATAAN DESA</p> <p>a. Penyelenggaraan Penataan Desa</p>	<p>1.020.000.000</p> <p>20.000.000</p>	<p>2.040.000.000</p> <p>20.000.000</p>
2	Meningkatnya Prosentase Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ➢ Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ➢ Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa ➢ Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas ➢ Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa ➢ Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa ➢ Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas ➢ Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa ➢ Jumlah Dokumen Profil Desa ➢ Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan ➢ Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota ➢ Jumlah Penerimaan Iuran pembayaran BPJS untuk Aparatur Perangkat Desa 	<p>80% Dokumen</p> <p>80% Dokumen</p> <p>80% Dokumen</p> <p>270 Orang</p> <p>80% Dokumen</p> <p>100% Orsng</p> <p>75% Dokumen</p> <p>90% Dokumen</p> <p>100% Dokumen</p> <p>75% Dokumen</p> <p>100% Orsng</p>	<p>1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH</p> <p>a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</p> <p>a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa</p> <p>3. PROGRAM PENATAAN DESA</p> <p>a. Penyelenggaraan Penataan Desa</p>	<p>87.823.779.600</p> <p>25.000.000</p> <p>898.102.488</p>	<p>87.923.779.600</p> <p>25.000.000</p> <p>925.902.488</p>

3	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah	<p>>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>> Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota.</p> <p>> Jumlah Orang Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>> Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata</p> <p>>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</p> <p>>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>>Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>75% Dokumen</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Orang</p> <p>100% Keluarga</p> <p>100% Keluarga</p> <p>100% Sertifikat</p>	<p>1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</p> <p>a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <p>2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</p> <p>a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</p> <p>b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</p> <p>a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</p> <p>b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota</p>	<p>172.200.000</p> <p>525.100.000</p> <p>10.000.000</p> <p>274.000.000</p> <p>95.000.000</p> <p>35.000.000</p> <p>108.000.000</p> <p>25.000.000</p> <p>70.200.000</p> <p>91.101.382.088</p>	<p>86.300.000</p> <p>611.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>774.000.000</p> <p>95.000.000</p> <p>35.000.000</p> <p>108.000.000</p> <p>25.000.000</p> <p>70.200.000</p> <p>92.749.182.088</p>
JUMLAH				91.101.382.088	92.749.182.088	



Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan adalah pernyataan kinerja/kesepakatan, kinerja/perjanjian, kinerja antara atasan (Bupati Barito Selatan) dengan bawahan (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Untuk mencapai target kinerja tersebut ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan besarnya anggaran yang akan digunakan.

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA (PPK)

TAHUN 2023

SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat ➢ Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Beningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ➢ Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Gun ➢ Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ➢ Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 	<p>50 Dokumen</p> <p>80% Dokumen</p> <p>80% Lembaga</p> <p>40% Unit</p> <p>80% Dokumen</p> <p>100% Laporan</p> <p>100% Dokumen</p> <p>30% Desa</p>	<p>35 Dokumen</p> <p>100% Dokumen</p> <p>72 Lembaga</p> <p>-</p> <p>90% Dokumen</p> <p>100% Laporan</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>70%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>-</p> <p>900%</p> <p>100%</p> <p>-</p> <p>-</p>
2	Meningkatnya Prosentase Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ➢ Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ➢ Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa ➢ Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa ➢ Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas ➢ Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa ➢ Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas ➢ Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa ➢ Jumlah Dokumen Profil Desa ➢ Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan ➢ Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota ➢ Jumlah Penerimaan Iuran pembayaran BPJS untuk Aparatus Perangkat Desa 	<p>80 Dokumen</p> <p>80 Dokumen</p> <p>80 Dokumen</p> <p>100 Orsng</p> <p>270 Orang</p> <p>80 Dokumen</p> <p>211 Orang</p> <p>75% Dokumen</p> <p>90% Dokumen</p> <p>100% Dokumen</p> <p>75% Dokumen</p> <p>100% Orang</p>	<p>80 Dokumen</p> <p>80 Dokumen</p> <p>80 Dokumen</p> <p>100 Orsng</p> <p>270 Orang</p> <p>75 %Dokumen</p> <p>211 Orang</p> <p>100% Dokumen</p> <p>100% Dokumen</p> <p>100% Dokumen</p> <p>100% Dokumen</p> <p>95% Orang</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>93,75%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p>

3	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	75% Dokumen	24 Orang	96%
		➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Orang	7 Orang	100%
		➢ Jumlah Orang Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Orang	8 Orang	100%
		➢ Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/Kota	100% Orang	2 Orang	100%
		➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Orang	1000 PPKS	100%
		➢ Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	100% Orang	34.000 KPM	100%
		➢ Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Keluarga	24 KPM	100%
		➢ Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Keluarga	450 KPM	98,70%
		➢ Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Sertifikat	4 LKS	100%
		➢ Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100% Keluarga	627 KPM	100%
		➢ Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Orang	6500 KPM	100%
		➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota.	100% Orang	200 Orang	100%
		4	Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	➢ Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Orang
➢ Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Orang			24 Orang	100%
➢ Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	100% Makam			1 Makam	100%
JUMLAH TOTAL RATA-RATA					119,50%

Buntok, Februari 2024



RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Angka Kemiskinan Daerah	30%	30%	20%	20%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Presentase Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	35.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Prosesntase Jumlah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang	95.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	91.500.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
		Angka Kemiskinan Ekstrim	30%	30%	20%	20%		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	82.500.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
		Indeks Desa Membangun	35%	25%	20%	20%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersediannya Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa (Alokasi Dana Desa)	86.785.529.600	DSPMD Kab. Barito Selatan
2.	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase PMKS yang mandiri	25%	25%	25%	25%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	97.200.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	525.100.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan

							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah rekomendasi persetujuan pengadaan kapal perikanan	78.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
3.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada DSPMD	20	20	20	20	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	70.200.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
							PROGRAM PENATAAN DESA	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	20.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	878.102.488	DSPMD Kab. Barito Selatan
							PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	290.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	150.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	240.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	30.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	78.750.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	69.500.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
							PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan

								Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	325.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	500.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
		Nilai SAKIP	B	B	B	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	30.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan	4.220.188.334	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang	15.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan data kepegawaian	34.900.000	DSPMD Kab. Barito Selatan

								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya bahan logistik kantor	520.198.250	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana kantor	45.300.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan fasilitas kantor	996.286.400	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional dan bangunan kantor yang dipelihara	203.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15.000.000	DSPMD Kab. Barito Selatan
								J U M L A H		97.161.255.072	

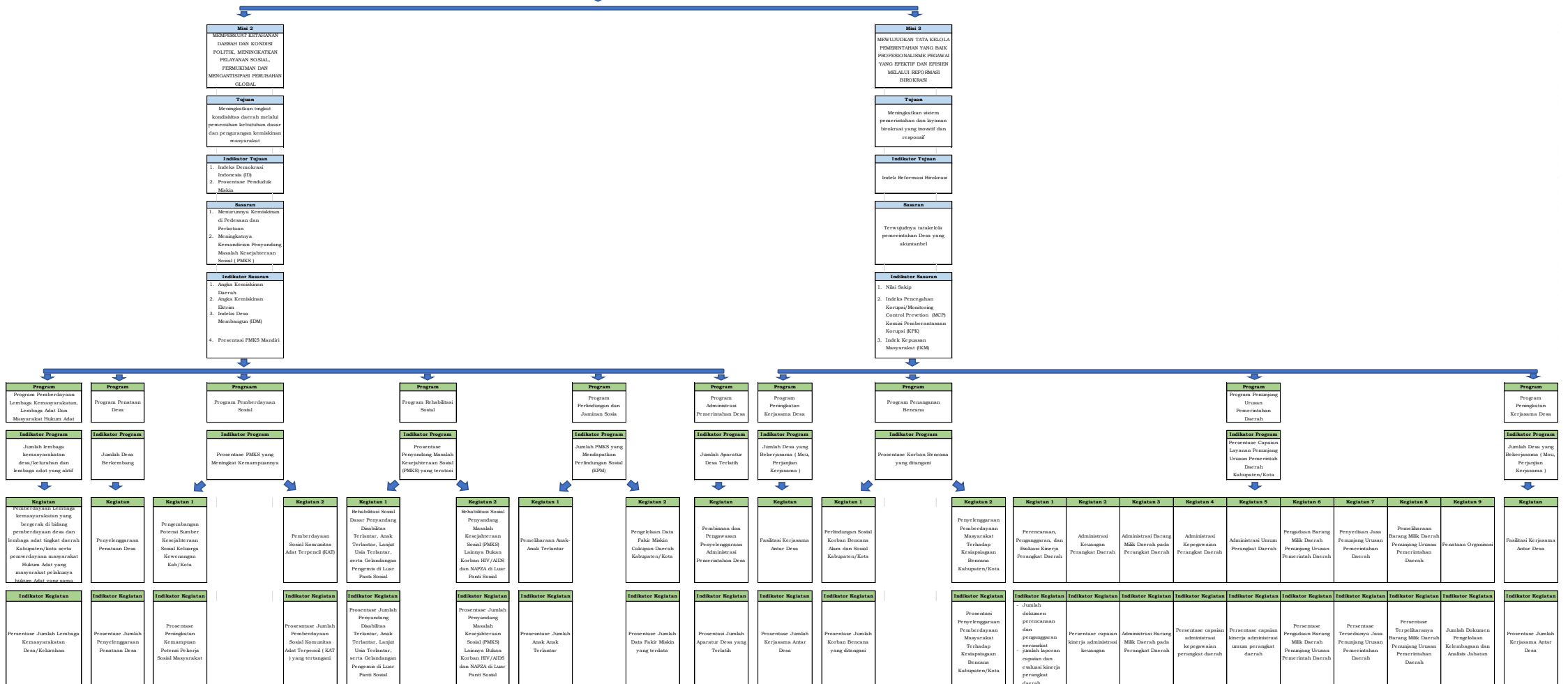


POHON KINERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

VISI BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026
"Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa"

VISI DSPMD KABUPATEN BARITO SELATAN
Udunya Masyarakat Pedesaan yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Bermartabat dan Berkeadilan



CASCADING

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator	Target Nilai Realisasi Investasi	Target	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
									Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total														
Memertunya kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Angka Kemiskinan Daerah		Rp 280.800.000,00	4,6	Belum Optimal Penyediaan Data DTKS yang Akutabel	Tersedianya Database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang Akutabel	Tersedianya Data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dye Name	Melakukan Pemastabahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Dokumen	Jumlah Dokumen Data DTKS	Dokumen	20%	15%	35%	30%	100%	Rp 91.500.000	DSPMD	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Angka Kemiskinan Daerah	Dokumen	100					
			Rp 33.500.000,00						Rp 58.000.000,00	Masih Rendahnya Kemampuan Potensi Sumber Keluarga Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah Pekerja Sosial Keluarga Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Melakukan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Dokumen	Jumlah Data Pekerja Sosial Yang meringkat Kemampuannya	Dokumen	10%	20%	40%	30%	100%	Rp 20.000.000	DSPMD	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Angka Kemiskinan Daerah	Dokumen	100
										Masih Rendahnya Kemampuan Potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya Peningkatan Kemampuan Potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Melakukan Peningkatan Kemampuan Potensi Lembaga Sosial Masyarakat	Dokumen	Jumlah Data Lembaga Sosial Yang meringkat Kemampuannya	Dokumen	10%	15%	45%	30%	100%	Rp 15.000.000	DSPMD	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Angka Kemiskinan Daerah	Dokumen	100
	Angka Kemiskinan Ekstrim		Rp 1.349.000.000,00	0,19	Masih ada masyarakat miskin yang belum tertangani	Pengantunan Masyarakat Miskin yang tepat sasaran	Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Sosial	Memberi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	Persen	Persentas Penerima Manfaat Bantuan Sosial	Persen	20%	30%	10%	40%	100%	Rp 82.500.000	DSPMD	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	0%	0%	0%	0%	61%	61%	Rp -	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Menurunnya kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	100					
	Indeks Desa Membangun		Rp 109.571.532.077,10	0,7018	Masih ada Desa Tertinggal	Meningkatkan Status Desa	Tersedianya Alokasi Dana Desa	Penyaluran Alokasi Dana Desa	Persen	Tersedianya Alokasi Dana Desa	Persen	25%	15%	25%	35%	100%	Rp 86.785.529.600	DSPMD	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Facilitasi Pengaluan Keuangan Desa (Alokasi Dana Desa/ADD)	Menurunnya kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Indeks Desa Membangun	Persen	100					
Penurunan Kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PMKS Mandiri	Rp 25.000.000,00	80	Banyaknya PMKS yang Belum Memiliki Alat Bantu	PMKS yang Belum Memiliki Alat Bantu	Tersedianya Bantuan Hibah Peralatan Alat Bantu	Bantuan Alat Bantu Untuk PMKS	Persen	Persentase Jumlah PMKS Penerima Alat Bantu	Persen	25%	25%	30%	20%	100%	Rp 25.000.000,00	DSPMD	Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Layjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	100					
			Rp 30.000.000,00						Banyaknya PMKS yang Belum Mendapatkan Reunifikasi Keluarga	PMKS yang Belum Reunifikasi Keluarga	Tersedianya Layanan Reunifikasi Keluarga	Layanan Reunifikasi Keluarga	Persen	Persentase Jumlah PMKS yang Menerima Layanan Reunifikasi Keluarga	Persen	25%	15%	35%	25%	100%	Rp 30.000.000,00	DSPMD	Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Layjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	100	
			Rp 49.000.000,00						Masih Belum Optimalnya Layanan Data dan Pengaduan	PMKS yang Belum Mendapatkan Layanan	Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persen	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Data dan Pengaduan	Persen	15%	30%	30%	25%	100%	Rp 20.000.000,00	DSPMD	Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Layjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	100	
			Rp 725.100.000,00						Pelayanan Kedaruratan yang Belum Optimal	PMKS yang Belum Mendapatkan Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian layanan Kedaruratan dan Terperuhinya Sarana dan Pemasaran Rumah Singgah	Pemberian Layanan Kedaruratan dan Rumah Singgah	Persen	Persentase Jumlah Penerima Layanan Kedaruratan	Persen	15%	40%	30%	15%	100%	Rp 525.100.000,00	DSPMD	Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	100	
			Rp 50.000.000,00						Masih Adanya Anak-Anak Terlantar yang belum terfasilitasi	Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Peningkatan Anak-Anak Terlantar	Memberikan layanan Terhadap Anak-Anak Terlantar	Persen	Persentase Jumlah Anak Terlantar yang Terlayani	Persen	50%	30%	10%	10%	100%	Rp 10.000.000,00	DSPMD	Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjagaan Anak-Anak Terlantar	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	100	
			Rp 100.000.000,00						Belum Optimal Penyediaan PMKS	Tersedianya Database Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tersedianya Data Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dye Name	Melakukan Pemastabahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dokumen	Jumlah Dokumen data PMKS	Dokumen	15%	25%	40%	20%	100%	Rp 100.000.000,00	DSPMD	Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Rp -	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Dokumen	100	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Target Kinerja Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Untuk mewujudkan Target Kinerja tersebut telah di buat Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan besaran anggaran yang akan digunakan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 tersebut dilaksanakan dalam jangka 1 Tahun. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut perlu indikator yang dapat diukur seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023. Ada 4 (empat) Sasaran Strategis yang hendak dicapai. Sasaran Strategis ini dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan menggunakan 6 (Enam) indikator kinerja dan target yang dapat diukur. Cara pengukurannya dengan membandingkan realisasi yang telah dicapai dengan target yang telah ditentukan mencapai 100%. Hasil pengukuran target kinerja tersebut seperti terdapat dalam Pengukuran Penetapan Kinerja (PPK).

Disamping itu pencapaian Target Kinerja Tahun 2023 juga di ukur dengan cara membandingkan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2023.

TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2022 S/D 2023

SKPD : Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat ➢ Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Beningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ➢ Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ➢ Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ➢ Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 	<p>3 Kegiatan 1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p>	<p>3 Kegiatan 1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p>	<p>50 Dokumen 80% Dokumen</p> <p>80% Lembaga</p> <p>40% Unit</p> <p>80% Dokumen</p> <p>100% Laporan 100% Dokumen</p> <p>30% Desa</p>	<p>35 Dokumen 100% Dokumen</p> <p>72 Lembaga</p> <p>-</p> <p>90% Dokumen</p> <p>100% Laporan - -</p>
2	Meningkatnya Prosentase Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ➢ Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ➢ Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa ➢ Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa ➢ Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas ➢ Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa ➢ Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas ➢ Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa ➢ Jumlah Dokumen Profil Desa ➢ Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan ➢ Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota ➢ Jumlah Penerimaan Iuran pembayaran BPJS untuk Aparatur Perangkat Desa 	<p>1 Kegiatan</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>17 Desa</p> <p>24 Desa</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>93 Desa/Kel</p>	<p>1 Kegiatan</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>17 Desa</p> <p>24 Desa</p> <p>86 Desa/Kel</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>-</p> <p>93 Desa/Kel</p>	<p>80% Dokumen</p> <p>80% Dokumen</p> <p>80% Dokumen</p> <p>100% Orsng</p> <p>270 Orang</p> <p>80% Dokumen</p> <p>75% Dokumen</p> <p>90% Dokumen</p> <p>100% Dokumen</p> <p>75% Dokumen</p> <p>100% Orsng</p>	<p>80 Dokumen</p> <p>80 Dokumen</p> <p>80 Dokumen</p> <p>100 Orsng</p> <p>270 Orang</p> <p>75 %Dokumen</p> <p>211 Orang</p> <p>100% Dokumen</p> <p>100% Dokumen</p> <p>100% Dokumen</p> <p>95% Orang</p>

3	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun	75% Dokumen	24 Orang (100%)
		➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun	100% Orang	7 Orang (100%)
		➢ Jumlah Orang Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun	100% Orang	8 Orang (100%)
		➢ Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun	100% Orang	2 Orang (100%)
		➢ Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun	100% Orang	1000 PPKS (100%)
		➢ Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didata	1 Tahun	1 Tahun	100% Orang	34.000 KPM (100%)
		➢ Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun	100% Keluarga	24 KPM (100%)
		➢ Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun	100% Keluarga	450 KPM (98,70%)
		➢ Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun	100% Sertifikat	4 LKS (100%)
		➢ Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun	100% Keluarga	627 KPM (100%)
4	Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	➢ Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100% Orang	59.228 Jiwa (100%)
		➢ Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Kegiatan	100% Orang	24 Orang (100%)
		➢ Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Kegiatan	1 Makam	1 Makam (100%)

Buntok, Februari 2024



Hasil Pengukuran Pencapaian kinerja (PPK) Tahun 2023 pada umumnya target kinerja tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran 3 (Tiga) Sasaran Strategis, Nilai Capaian Tingkat Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 adalah sebesar 100% seperti tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	96,98 %
2.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	99,9 %
3.	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	99,97 %
	Rata-rata	98,95 %

Berdasarkan perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 2023 terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan pada semua kriteria program kegiatan cakupan indikator kinerja sasaran strategis.

B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK), secara umum Tingkat Capaian Kinerja yang diperoleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 telah mencapai Target Kinerja dengan Total Nilai 98,95 % (baik). Jadi program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023.

Demikian juga dari hasil perbandingan dengan realisasi kinerja Tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Barito Selatan.

C. Evaluasi Capaian Kinerja

Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari hasil capaian kinerja Tahun 2023 ini, yakni :

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan, sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan/kegagalan pembangunan.
2. PK (Penetapan Kinerja) yang disusun, hanya sebagian yang mengacu pada Renstra. Karena renstra yang ada tidak lengkap sehingga perlu disempurnakan lagi.
3. Untuk kesempurnaan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu dilakukan bimtek oleh petugas yang mempunyai kompetensi yang sesuai (IKU yang ada pada RPJMD tidak lengkap, sehingga sulit untuk dijabarkan pada renstra SOPD).

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Secara kumulatif hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dan hasil perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum, capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan telah berhasil dengan baik mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan total nilai 98,95 %.
2. Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) dilakukan untuk mengukur kelompok sasaran dan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan menggunakan 6 (Enam) indikator kinerja. Umumnya semua sasaran strategis tersebut telah berhasil dengan sangat baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk indikator kinerja yang diukur umumnya semua mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan.
3. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya yakni Tahun 2023, secara umum semua indikator kinerja mengalami peningkatan khususnya pada penambahan beban kerja dengan hasil sangat baik dibandingkan Tahun sebelumnya, dengan demikian pelayanan yang diberikan Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 meningkat dengan hasil sangat baik pula dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

B. SARAN TINDAK LANJUT

Dari hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dengan pembandingan capaian kinerja sangat baik, maka untuk kedepannya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran kinerja RKT yang disusun pada Tahun 2023, sinkronisasi dengan Renstra 2023 - 2026 sudah mulai ada kesesuaian berdasarkan kebutuhan dan kelayakan.
2. Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan lagi agar keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan dapat teralokasikan.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) masih perlu disinkronisasi dengan program kegiatan yang dilaksanakan.